

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PERIODE JANUARI – DESEMBER 2022

PT. BPR PRIMA NADI



Kantor Pusat :

Jl. A. A. Gede Ngurah No.
95 Cakranegara, Telp.
(0370) 637269, 624557
www.bprprimanadi.co.id



BAB I

PENJELASAN UMUM

Seiring dengan meningkatnya persaingan serta risiko bisnis dan operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness) diharapkan PT. BPR Prima Nadi dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham BPR, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik (The Best Practice).

PT. BPR Prima Nadi menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu keharusan untuk dapat menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan.

Tujuan penerapan Tata Kelola yang baik bagi PT. BPR Prima Nadi antara lain untuk:

1. Mendukung visi PT. BPR Prima Nadi, yaitu "Menjadi BPR yang SEHAT, HANDAL, TERPERCAYA dan UTAMA";
2. Mendukung misi PT. BPR Prima Nadi;
3. Memberi manfaat nilai tambah bagi para pemegang saham;
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang; dan
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat, nasabah dan stakeholder.



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Oenit Ingmadia
	NIK	:	
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>1. Bersama Direktur lain bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR, membuat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta melaksanakan rencana strategis BPR;</p> <p>2. Menyelenggarakan RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar BPR;</p> <p>3. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu serta memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris;</p> <p>4. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan organisasi BPR antara lain terpenuhinya jumlah sumber daya manusia, pemisahan tugas dan tanggung jawab antara unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional serta menunjuk dan mengangkat Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern, Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang independen terhadap unit kerja lain;</p> <p>5. Memastikan tindak lanjut hasil temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya;</p> <p>6. Memastikan terlaksananya pembuatan dan penyampaian laporan baik laporan berkala atau laporan yang bersifat khusus;</p> <p>7. Melakukan pembinaan dan koordinasi bersama Direktur lainnya atas pelaksanaan program kerja seluruh unit kerja BPR;</p> <p>8. Membuat sasaran kerja dibidang pemasaran, operasional dan kredit sesuai dengan rencana kerja perusahaan yang telah ditetapkan;</p> <p>9. Membuat perencanaan, melakukan langkah konkret serta mengevaluasi kualitas portofolio baik penghimpunan dana maupun penyaluran kredit serta pengembangannya;</p> <p>10. Memastikan penanganan kredit bermasalah terlaksana sesuai dengan target, pedoman dan kebijakan serta sistem dan prosedur yang berlaku;</p> <p>11. Memastikan transaksi yang dilakukan menghasilkan pendapatan yang optimal;</p> <p>12. Melakukan supervisi atas pengembangan Sumber Daya Manusia pada semua unit kerja dan jenjang organisasi serta menciptakan iklim kerja yang baik;</p>			
2.	Nama	:	Albertus Ary Utama
	NIK	:	
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		



PT. BPR PRIMA NADI

JL. A.A. Gde Ngurah No. 95 Cakranegara Mataram

Telepon: 0370-637269

Website: www.bprprimanadi.co.id. Email: manrisk.bprprimanadi@gmail.com

Tugas dan tanggung jawab Direktur Operasional dan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, yaitu:

1. Bersama Direktur Utama dan Direktur lainnya merealisasikan rencana strategis BPR;
2. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan;
3. Membuat Daftar Pemegang Saham berikut daftar sahamnya, risalah RUPS dan risalah Rapat Direksi, serta mendokumentasikannya;
4. Tugas Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yaitu memastikan BPR telah memenuhi terlaksananya seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan, antara lain (i) menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan, (ii) menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat kepada Otoritas, (iii) mencegah Direksi BPR untuk menetapkan kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau perundang-undangan, (iv) menyampaikan laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/ atau keputusan Direksi yang menurut pendapatnya menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau perundang-undangan lainnya;
5. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris;
6. Mengarahkan, membimbing, mensupervisi dan mendorong Pejabat Eksekutif dan seluruh Staf dibawahnya untuk memberikan kinerja terbaik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
7. Melakukan penilaian kinerja terhadap Pejabat Eksekutif dibawahnya;
8. Memastikan kecukupan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur internal BPR;
9. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama; dan
10. Melakukan pengawasan terhadap kondisi lingkungan kerja BPR terkait keamanan dan kenyamanan, baik secara langsung ataupun tidak langsung;

3.	Nama	:	I Gusti Ketut Sri Putranta
	NIK	:	
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kredit, yaitu: 1. Memberikan arahan, bimbingan dan supervisi kepada Pejabat Eksekutif dan seluruh Staf dibawahnya berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing mulai dari kegiatan proses kredit, pembinaan kredit dan penanganan kredit bermasalah; 2. Menyelenggarakan rapat komite kredit; 3. Memastikan dan mengevaluasi dengan seksama terhadap setiap portofolio kredit sesuai dengan pedoman, sistem dan prosedur yang berlaku sehingga mampu mengamankan perusahaan dari timbulnya risiko kredit; 4. Melakukan koordinasi dan mengarahkan unit kerja terkait dalam hal penanganan kredit bermasalah; 5. Membuat perencanaan dan melakukan langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan kualitas portofolio kredit; 6. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama; 7. Mengusahakan agar setiap penyaluran kredit menghasilkan pendapatan yang optimal; 8. Mengarahkan dan mendorong Pejabat Eksekutif dan seluruh Staf dibawahnya untuk memberikan kinerja yang terbaik sesuai rencana kerja yang ditetapkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku; 9. Melakukan evaluasi dan kajian terkait pengembangan unit kerja dibawahnya agar tercipta iklim dan tim kerja yang baik sehingga hasil kerja efektif dan optimal; 10. Melakukan penilaian kinerja kepada Pejabat Eksekutif dibawahnya;		



PT. BPR PRIMA NADI

JL. A.A. Gde Ngurah No. 95 Cakranegara Mataram

Telepon: 0370-637269

Website: www.bprprimanadi.co.id. Email: manrisk.bprprimanadi@gmail.com

11. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :
1. Telah melakukan review dan evaluasi terkait struktur organisasi dan sumber daya manusia yang ada. 2. Meningkatkan kompetensi seluruh pegawai dengan mengadakan pelatihan internal secara berkesinambungan dan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal. 3. Telah menggunakan Lawyer yang berintegritas dan sudah pelajari dengan baik terkait Perjanjian Kerjasama dan Surat Kuasanya. 4. Telah menyusun action plan penyelesaian kredit bermasalah dan akan fokus menjalankannya sesuai prosedur agar hasilnya optimal. 5. Terkait dengan restrukturisasi POJK 11 (relaksasi), telah dilakukan kajian dan simulasi stress test untuk mengetahui ketahanan modal. 6. Telah dilakukan kajian terkait dengan kemampuan bayar, usaha dan penilaian agunan untuk debitur relaksasi. 7. Akan segera menuntaskan Key Performance Indicator (KPI). 8. Menindak lanjuti rekomendasi terkait digitalisasi, Direksi telah menjalin kerja sama dengan PT. Kreditek Financial Acces untuk membangun system aplikasi Prima Nadi Akses untuk mempermudah pengajuan dan proses permohonan kredit dari calon debitur. 9. Sehubungan dengan point 8, Direksi telah melakukan uji coba dan melakukan penerapannya secara paralel, sehingga pada tahun 2023 telah dapat berjalan secara optimal. 10. Dengan melibatkan Pejabat Eksekutif terkait, berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan audit, baik audit internal maupun audit eksternal. 11. Bersama dengan Bagian Bisnis, telah melakukan kunjungan secara berkala ke debitur dengan fasilitas kredit yang baru cair dan ke debitur dengan kualitas kredit lancar, untuk dapat memastikan bahwa kredit digunakan sesuai dengan peruntukannya dan untuk membangun loyalitas debitur. 12. Menyusun Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2023 dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Komisaris.
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Ronny Abdikesuma
	NIK	:	
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR; 2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada seluruh kegiatan usaha BPR; 3. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; 4. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; 5. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja		



PT. BPR PRIMA NADI

JL. A.A. Gde Ngurah No. 95 Cakranegara Mataram

Telepon: 0370-637269

Website: www.bprprimanadi.co.id. Email: manrisk.bprprimanadi@gmail.com

sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

6. Memberikan pertimbangan atas usulan Direktur Utama BPR dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eksekutif Audit Intern;

7. Dalam penerapan Manajemen Risiko, antara lain menyetujui, memastikan dan mengevaluasi kebijakan serta pertanggungjawaban pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi serta mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;

8. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan adanya kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan, kecuali (i) dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, (ii) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BPR, (iii) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan (iv) telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

2.	Nama	:	Ida Komang Suwignya
	NIK	:	
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
1. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR;			
2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada seluruh kegiatan usaha BPR;			
3. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;			
4. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;			
5. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;			
6. Memberikan pertimbangan atas usulan Direktur Utama BPR dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eksekutif Audit Intern;			
7. Dalam penerapan Manajemen Risiko, antara lain menyetujui, memastikan dan mengevaluasi kebijakan serta pertanggungjawaban pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi serta mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;			
8. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan adanya kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan, kecuali (i) dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, (ii) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BPR, (iii) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan (iv) telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.			
3.	Nama	:	Thony Wijaya
	NIK	:	



PT. BPR PRIMA NADI

JL. A.A. Gde Ngurah No. 95 Cakranegara Mataram

Telepon: 0370-637269

Website: www.bprprimanadi.co.id. Email: manrisk.bprprimanadi@gmail.com

Jabatan	:	Komisaris Utama
Tugas dan Tanggung Jawab :		
<ol style="list-style-type: none">1. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR;2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada seluruh kegiatan usaha BPR;3. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;4. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;5. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;6. Memberikan pertimbangan atas usulan Direktur Utama BPR dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eksekutif Audit Intern;7. Dalam penerapan Manajemen Risiko, antara lain menyetujui, memastikan dan mengevaluasi kebijakan serta pertanggungjawaban pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi serta mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;8. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan adanya kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan, kecuali (i) dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, (ii) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BPR, (iii) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan (iv) telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.		
Rekomendasi Kepada Direksi :		
<ol style="list-style-type: none">1. Agar melakukan review dan evaluasi kembali terhadap struktur organisasi dan SDM agar dapat bekerja lebih efektif dan optimal.2. Untuk dapat memilih Lawyer yang memiliki berintegritas integritas, dan untuk dapat mempelajari secara seksama draft Perjanjian Kerjasama serta Surat Kuasanya sebelum melakukan hubungan dengannya.3. Terhadap NPL yang ada agar membuat rencana tindak untuk penyelesaiannya dan fokus dalam melakukan eksekusinya sehingga sesuai dengan prosedur yang berlaku.4. Untuk dapat melakukan penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah secara efektif dan efisien, merekomendasikan agar dapat melakukan peningkatan skli negosiasi dan komunikasi karyawan khususnya dibagian penanganan kredit bermasalah.5. Sehubungan dengan adanya kebijakan relaksasi, agar dilakukan kajian dan simulasi (stress test) untuk dapat mengetahui ketahanan modal Bank, sebagaimana ditetapkan dalam POJK No. 11 (relaksasi).6. Terhadap debitur yang tidak mampu bangkit pasca diberikan kebijakan relaksasi sehingga menyebabkannya tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran kreditnya, maka agar tidak dilakukan perpanjang relaksasinya kembali, dan selanjutnya untuk ditindak lanjuti dengan melakukan penilaian terhadap agunannya dengan baik.7. Untuk dapat memfinalisasi program Key Performance Indicator (KPI) agar pada tahun 2023 telah dapat berjalan.8. Untuk dapat melakukan inovasi produk dan digitalisasi dengan mencari referensi yang sesuai dengan kebutuhan Bank.9. Untuk dapat menindak lanjuti hasil pemeriksaan dan/atau temuan dari tim audit, baik dari internal ataupun eksternal sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang berulang.		



	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
BPR tidak memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi.			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Oenit Ingmadia		Rp0,00	0%
2.	Albertus Ary Utama		Rp0,00	0%
3.	I Gusti Ketut Sri Putranta		Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak ada yang memiliki saham di BPR Prima Nadi.				

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Oenit Ingmadia		-	-	0%
2.	Albertus Ary Utama		-	-	0%
3.	I Gusti Ketut Sri Putranta		-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Anggota Direksi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak ada yang memiliki saham di perusahaan lain.					



C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Oenit Ingmadia		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Albertus Ary Utama		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	I Gusti Ketut Sri Putranta		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Anggota Direksi PT. BPR Prima Nadi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.					

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Oenit Ingmadia		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Albertus Ary Utama		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	I Gusti Ketut Sri Putranta		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Anggota Direksi PT. BPR Prima Nadi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi Lain, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.					



D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ronny Abdikesuma		Rp900.000.000,00	10%
2.	Ida Komang Suwignya		Rp0,00	0%
3.	Thony Wijaya		Rp3.600.000.000,00	40%

Penjelasan Lebih Lanjut :

Dari 3 (tiga) orang anggota Komisaris, terdapat 2 (dua) orang anggota komisaris yang merupakan Pemegang Saham PT. BPR Pirma Nadi yaitu Tn. Thony Wijaya sebesar 40% dan Tn. Ronny Abdikesuma sebesar 10%.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ronny Abdikesuma		601062	PT. BPR Prima Dewata	10%
2.	Ronny Abdikesuma		602706	PT BPR Prima Sejahtera	10%
3.	Thony Wijaya		602706	PT BPR Prima Sejahtera	45%
4.	Thony Wijaya		601062	PT. BPR Prima Dewata	45%

Penjelasan Lebih Lanjut :

Dari 3 (tiga) orang anggota Komisaris terdapat 2 (dua) orang anggota Komisaris PT. BPR Prima Nadi yaitu Tn. Thony Wijaya dan Tn. Ronny Abdikesuma memiliki saham pada BPR lain yaitu pada PT. BPR Prima Dewata dan PT. BPR Prima Sejahtera dengan komposisi kepemilikan sebagaimana data tersebut diatas.



PT. BPR PRIMA NADI

JL. A.A. Gde Ngurah No. 95 Cakranegara Mataram

Telepon: 0370-637269

Website: www.bprprimanadi.co.id. Email: manrisk.bprprimanadi@gmail.com

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Ronny Abdikesuma		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ida Komang Suwignya		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Thony Wijaya		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut :

Tidak terdapat hubungan keuangan antara Dewan Komisaris PT. BPR Prima Nadi dengan anggota Dewan Komisaris Lain, anggota Direksi dan Pemegang Saham.

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Ronny Abdikesuma		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ida Komang Suwignya		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Thony Wijaya		Tidak ada	Tidak ada	Yasin Wijaya - Kakak Kandung, Linda Trisnawati - Ibu Kandung

Penjelasan Lebih Lanjut :

Sebagaimana data tersebut diatas dapat disampaikan bahwa:

1. Tidak terdapat hubungan keluarga antara Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris yang Lain.
2. Tidak terdapat hubungan keluarga antara Dewan Komisaris dengan anggota Direksi.
3. Dari 3 (tiga) orang anggota Komisaris, terdapat 1 (satu) orang anggota komisaris yaitu Tn. Thony Wijaya memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham PT. BPR Prima Nadi.



F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp587.911.248,00	3	Rp353.278.512,00
2.	Tunjangan	0	Rp0,00	0	Rp0,00
3.	Tantiem	0	Rp0,00	0	Rp0,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp587.911.248,00		Rp353.278.512,00
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Paket/ kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Prima Nadi ditetapkan oleh RUPS					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil (3)	Mobil (1)
3.	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Prima Nadi dalam bentuk transportasi yaitu mobil.			



G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3.31 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.56 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.59 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.48 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Gaji yang diperbandingkan dalam ratio tersebut di atas, adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pegawai per tahun. Yang dimaksud dengan pegawai adalah seluruh pegawai tetap PT. BPR Prima Nadi.	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	24 Januari 2022	2	Evaluasi RBB bulan Desember 2021
2.	08 Maret 2022	2	Kebijakan dan isu-isu strategis
3.	19 Mei 2022	2	Evaluasi RBB Bulan April 2022
4.	20 Juli 2022	2	Isu-isu strategis.
5.	26 September 2022	2	Isu-isu dan kebijakan strategis.
6.	30 November 2022	3	Penetapan Rencana Bisnis BPR Tahun 2023
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Dalam tahun 2022 Dewan Komisaris melaksanakan Rapat sebanyak 6 (enam) kali. Dari 6 (enam) kali pelaksanaan rapat, sebanyak 5 (lima) kali pelaksanaan rapat dihadiri secara fisik oleh 2 (dua) orang anggota komisaris dan 1 (satu) kali pelaksanaan rapat dihadiri secara fisik oleh 3 (tiga) orang anggota komisaris, karena 1(satu) orang anggota Komisaris yaitu Komisaris Utama baru tercatat secara resmi dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 26 Oktober 2022.			



PT. BPR PRIMA NADI

JL. A.A. Gde Ngurah No. 95 Cakranegara Mataram

Telepon: 0370-637269

Website: www.bprprimanadi.co.id. Email: manrisk.bprprimanadi@gmail.com

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Ronny Abdikesuma		6	0	100%
2.	Ida Komang Suwignya		6	0	100%
3.	Thony Wijaya		1	0	16.666666 666666664 %

Penjelasan Lebih Lanjut :

Pada tahun 2022, dari 6 (enam) kali pelaksanaan rapat Dewan Komisaris, sebanyak 5 (lima) kali rapat dilaksanakan oleh 2 (dua) orang anggota Komisaris, karena 1 (satu) orang anggota Komisaris BPR yaitu Komisaris Utama baru definitif tercatat pada administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 26 Oktober 2022.

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	1	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		1		0

Penjelasan Lebih Lanjut :

Dalam tahun 2022 terdapat 1 (satu) indikasi yang dilakukan oleh 1 (satu) orang pegawai tetap, yang dalam tahun tahun laporan telah ditindak lanjuti melalui proses hukum.



J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	7	12
Total	7	12
Penjelasan Lebih Lanjut		
Permasalahan hukum Perdata yang dihadapi Bank terdiri dari: 1. Proses Kasasi di tingkat Mahkamah Agung; 2. Banding dari Debitur atas Putusan Tingkat Pertama; 3. Gugatan dari Debitur yang saat ini dalam tahap persidangan; 4. Proses penyidikan terhadap Debitur; 5. Proses Anmaning oleh Pengadilan;		
Proses hukum Pidana yang dihadapi Bank seluruhnya dalam tahap proses penyidikan terhadap debitur yang melakukan perbuatan pengalihan objek jaminan fidusia.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.									
2.									
3.									
Penjelasan Lebih Lanjut :									
Pada tahun 2022, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan									

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	20 April 2022	Sosial	Pemberian sumbangan dalam bentuk beras kepada Masjid.	Masyarakat	Rp1.000.000,00
2.	25 April 2022	Sosial	Pemberian sumbangan dalam bentuk zakat	Masyarakat	Rp920.000,00
3.	25 November 2023	Sosial	Partisipasi pemberian bantuan	Masyarakat	Rp2.500.000,00



PT. BPR PRIMA NADI

JL. A.A. Gde Ngurah No. 95 Cakranegara Mataram

Telepon: 0370-637269

Website: www.bprprimanadi.co.id. Email: manrisk.bprprimanadi@gmail.com

			atas bencana alam Gempa		
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Sebagaimana daftar tersebut diatas, selama tahun 2022, PT. BPR Prima Nadi 3 kali memberikan sumbangan untuk kegiatan Sosial.					

Mataram, 24 Januari 2023

PT. BPR PRIMA NADI


Thony Wijaya
Komisaris Utama



Oenit Ingmadia
Direktur Utama 



HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR PRIMA NADI
Alamat	: JL. A.A. Gde Ngurah No. 95 Cakranegara Mataram
Nomor Telepon	: 0370-637269
Posisi Laporan	: Desember 2022
Modal Inti	: Rp23.601.487.483,00
Total Aset	: Rp240.424.212.372,26

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR PRIMA NADI Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.8 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.74	0.348
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.61	0.242
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.5	0.15
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.47	0.247
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.85	0.185
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.1	0.028
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.02	0.202
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.2	0.09
10	Rencana Bisnis BPR	1.9	0.143
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.9	0.143
Nilai Komposit			1.8
Predikat Komposit			Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.74)

Jumlah anggota Direksi PT. BPR Prima Nadi sebanyak 3 (tiga) orang dan masing-masing telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pedoman dan tata tertib Direksi yang telah ditetapkan. 1 (satu) anggota berfungsi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.61)

Dewan Komisaris PT. BPR Prima Nadi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Pada periode tahun 2022, jumlah modal inti PT. BPR Prima Nadi masih dibawah Rp.50 Milyar sehingga belum membentuk Komite

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1.5)

Selama periode tahun 2022, PT. BPR Prima Nadi tidak pernah mengalami benturan kepentingan

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.47)

PT. BPR Prima Nadi selalu berusaha menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, namun selama tahun 2022, hasil yang dicapai belum maksimal karena ada beberapa keterlambatan pelaporan yang terjadi.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.85)

PT. BPR Prima Nadi telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.1)

PT. BPR Prima Nadi telah menerapkan fungsi audit ekstern sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.02)

Sehubungan tahun 2022, modal inti PT. BPR Prima Nadi masih dibawah Rp. 50 Milyar, maka pada semester II tahun 2022 bank telah menerapkan 4 (empat) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.2)

Selama periode tahun 2022, PT. BPR Prima Nadi telah melaksanakan ketentuan BMPK secara baik dan tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK.



PT. BPR PRIMA NADI

JL. A.A. Gde Ngurah No. 95 Cakranegara Mataram

Telepon: 0370-637269

Website: www.bprprimanadi.co.id. Email: manrisk.bprprimanadi@gmail.com

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.9)

Penyusunan Rencana Bisnis PT. BPR Prima Nadi untuk tahun 2022 sebagian besar telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.9)

Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan PT. BPR Prima Nadi telah dilaksanakan dengan baik namun kedepan masih perlu ditingkatkan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 78 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, maka setelah dilakukan penilaian sendiri (Self Assesment) terhadap Penerapan Tata Kelola tahun 2022 diperoleh Nilai Komposit yaitu 1,8 (Satu koma delapan) atau berpredikat Baik.

Mataram, 24 Januari 2023

PT. BPR PRIMA NADI


Thony Wijaya
Komisaris Utama



Oenit Ingmadia
Direktur Utama



LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola
PT. BPR PRIMA NADI Tahun 2022**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR PRIMA NADI selama tahun 2022. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Mataram, 24 Januari 2023

PT. BPR PRIMA NADI


Thony Wijaya
Komisaris Utama



Oenit Ingmadia
Direktur Utama